

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mendorong setiap individu maupun kelompok untuk selalu menyesuaikan perkembangan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan informasi serta pengelolaan data dalam kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan teknologi telah menjadi semakin modern di dunia sekarang ini dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari (Naqibah et al., 2021). Bukan hanya individu saja yang membutuhkan perkembangan teknologi namun juga dalam kaitannya dengan konsep *Collaborative Governance* yang juga membutuhkan sebuah teknologi informasi dengan tujuan menunjang produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Komitmen untuk mencapai tujuan yang sama sangat penting untuk terlaksananya *Collaborative Governance*. Sehingga faktor kunci dalam pembentukan kolaborasi adalah ilmu pengetahuan, kepemimpinan dan pengalaman, selain itu faktor internal juga sangat menentukan seperti kepemimpinan politik dan dukungan keuangan. (Hudaya & Dewi, 2021). Selanjutnya (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020b) dalam bukunya menjelaskan dalam bukunya faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sifatnya otonomi, kerja sama, dan kolaborasi. Faktor yang paling mempengaruhi kolaborasi terdiri dari kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, transparansi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan bersama dalam mengambil sebuah resiko. Kolaborasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan kemudahan dalam beberapa masalah yang kemungkinan terjadi. Dalam halnya konsep kerja sama adalah sumber yang dianggap sangat efektif dalam hal kualitas layanan, terutama dalam konteks kerja sama ekonomi, terutama pembelian dan penjualan.

Berbagai kemudahan yang diberikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang seringkali menjadi sebuah alternatif yang digunakan termasuk dalam sebuah kerjasama kolaboratif antara pemerintah dengan *stakeholder* dalam upaya memajukan perekonomian melalui sektor UMKM. Menurut (Wicaksono, 2018) Pertumbuhan dan perkembangan pada sektor perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran sektor UMKM. Adanya sektor UMKM memberikan dampak berkurangnya tingkat pengangguran dikarenakan adanya penyerapan tenaga kerja yang belum terserap di dunia kerja. UMKM menjadikan pertumbuhan dan perkembangan dalam kesempatan kerja dan pendapatan meningkat. Keberadaan UMKM saat ini tidak bisa hanya dipandang sebelah mata, dengan semakin menjamurnya produk UMKM terbukti telah berhasil menjadi roda penggerak ekonomi di Indonesia.

Menghadapi era revolusi industri 4.0 serta adanya keterbatasan saat pandemi ini, seluruh pelaku UMKM harus mulai masuk ke dunia digital. Salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM yaitu melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi termasuk di dalamnya terdapat kegiatan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet atau biasa disebut dengan *e-commerce*. Berada pada era postmodernisme yang memiliki berbagai perubahan terutama dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi dunia industri seperti halnya terjadi peningkatan dalam pelayanan di bidang ekonomi dengan peran media massa disini terlihat sangat kuat, dan merubah pola konsumsi masyarakat (Rantung et al., 2018). Perlahan semua aspek sudah beralih ke arah digital, sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terpisahkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan sudah tersedia secara digital, mulai dari jual beli, jasa, hingga transaksi pembayaran. Teknologi menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital sehingga mampu mentransfer data tanpa bantuan manusia serta dengan adanya big data agar mampu

membantu menentukan arah dalam bisnis.

Dari tahun ke tahun berbagai upaya telah dilakukan, dengan meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran menjadi target yang terus diupayakan oleh para pelaku UMKM. Munculnya pandemi *Covid-19* menimbulkan dampak yang buruk terhadap para pelaku UMKM. Penyebaran virus yang semakin tidak terkendali memaksa seluruh dunia untuk melakukan kebijakan *lockdown*, yaitu melakukan pembatasan secara total seluruh terhadap kegiatan masyarakat baik dalam urusan ekonomi, pendidikan, maupun kegiatan keagamaan. Seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan menjadi hal yang dilarang dalam rangka membatasi penyebaran *Covid-19* ini. Menurunnya omzet penjualan dikarenakan terbatasnya ruang gerak bagi mereka untuk mempromosikan dan mengembangkan usahanya (Auliya & Arif, 2021). Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9% UMKM memutuskan untuk mengurangi stok barang selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat *Covid-19*. Sementara itu 16,1% UMKM memilih untuk mengurangi karyawan. Bahkan hasil survey menunjukkan bahwa kesulitan yang belum pernah dihadapi perusahaan sebelumnya akibat pandemi *Covid-19*, yaitu dua dari tiga perusahaan yang menghentikan operasinya baik sementara maupun secara permanen, karena pendapatan menurun drastis. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluarannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual (Faizi

et al., 2022).

Pemberlakuan PSBB secara otomatis melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana mobilitas masyarakat dibatasi dengan adanya himbauan agar tetap di rumah demi mengurangi penyebaran virus yang sangat sulit dikendalikan. Kondisi tersebut berdampak kepada kegiatan jual beli bahan kebutuhan yang terjadi antara produsen dan konsumen di masyarakat Yogyakarta. Oleh karena itu pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY berinisiatif untuk menciptakan sebuah sistem jual beli online yang dapat diakses masyarakat kapan saja dan dimana saja tanpa harus melakukan kontak fisik secara langsung. Inovasi SiBakul *Markethub* hadir sebagai solusi untuk membantu permasalahan UMKM dengan memberikan fasilitas *free* ongkos kirim. Perkembangan teknologi yang begitu pesat dimanfaatkan sebaik baiknya, sehingga dalam kondisi pandemi *Covid-19* digitalisasi dapat membawa dampak dari segi kemudahan untuk melakukan jual beli. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui SiBakul *Markethub* Gratis Ongkir menjadi sebuah jawaban untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan diharapkan mampu menjadi upaya dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan pembelian produk serta memberikan fasilitas bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar memperoleh pasar dengan metode daring dan keringanan dalam hal biaya pengiriman.

Untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dibutuhkan sebuah komitmen dan koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, serta seluruh lapisan masyarakat yang berbasis pada sebuah kerjasama. Dampak dari lemahnya perekonomian Yogyakarta ditanggapi pemerintah dengan memberikan stimulus pada sisi permintaan serta mendorong platform digital dalam memperluas kemitraan. Kerjasama dalam pemanfaatan inovasi serta teknologi yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan fasilitas kebebasan ongkos kirim yang dinamai dengan SiBakul *Markethub* Gratis Ongkir. Pada awalnya SiBakul Jogja merupakan sebuah sistem bagi pendataan koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah dikembangkan di tahun 2019 yang kemudian sebagai *Markethub* dalam memasarkan produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang transaksinya dilakukan secara *online*. *Markethub* merupakan *marketplace* yang dikhususkan bagi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lapak untuk memasarkan produk-produk UMKM dengan menggunakan transaksi secara *online*. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY mencatat sebanyak 1.500 UMKM sudah masuk dalam *markethub* bebas ongkos kirim atau *free* ongkir melalui SiBakul Jogja. Melalui *Markethub* Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY untuk memberikan fasilitas gratis ongkir kepada UKM yang bergabung di dalamnya sebagai promo yang dapat mereka gunakan untuk menarik konsumen. Dalam program ini ongkos kirim dari penjualan produk UKM akan ditanggung oleh Dinas Koperasi DIY sesuai dengan syarat besaran transaksi yang telah ditentukan. SiBakul Jogja mencakup database serta penggolongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk upaya pembinaan pelaku usaha dengan memakai sebuah strategi yang efektif, cocok, dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berkesinambungan.

SiBakul *Markethub* Gratis Ongkir memiliki beberapa kelebihan. Pertama, bagi konsumen tidak ada biaya ongkir yang dibebankan terhadap pembelian produk dari UMKM. Biaya pengiriman tersebut akan ditanggung oleh pemerintah sehingga konsumen hanya perlu mengeluarkan biaya untuk produk yang mereka beli. Dengan demikian, UMKM yang tidak lagi memasarkan produknya secara langsung dapat memperoleh kembali pasarnya tanpa harus melakukan transaksi secara langsung. Kedua, bagi pelaku UMKM yang sudah tergabung dalam SiBakul akan mendapatkan kemudahan dalam

melakukan pemasaran produknya karena produk mereka akan tetap memperoleh pasar tanpa harus melakukan penjualan secara *offline* cukup melalui *platform* SiBakul. Kemudahan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi para pelaku UMKM untuk terus semangat, berinovasi, serta beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang saat ini terus berkembang.

Untuk menunjang keberhasilan skema pemerintah memajukan UMKM di masa pandemi, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan UKM turut serta menggandeng pihak swasta untuk turut serta bekerjasama mengembangkan program SiBakul *Markethub* Gratis Ongkir ini. JogjaKita dipilih sebagai salah satu mitra kerja SiBakul dalam kaitannya sebagai ekspedisi pengantaran barang dari penjual ke pembeli. Pada awalnya UMKM yang tergabung dalam Si Bakul *Markethub* tercatat ada 900 UMKM pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 1.500 UMKM. Sementara untuk UMKM yang sudah mendaftar lewat SiBakul Jogja sudah mencapai 285.000 UMKM. Artinya masih banyak pelaku UMKM dengan literasi *digital* yang masih belum optimal. Karena untuk mendaftar pada *markethub* terdapat persyaratan untuk memasang foto dan produk namun para pelaku UMKM masih banyak yang tidak memperhatikan hal itu.

Rendahnya pemahaman *e-commerce* bagi UMKM para pelaku UMKM harus disikapi secara tepat. Pemerintah dan pelaku usaha UMKM sebagai *stakeholder* utama harus mendapatkan masukan yang valid mengenai kondisi eksisting dan potensi pengembangan serta faktor pendukung dan penghambat *e-commerce* bagi UMKM di DIY. Misalnya pemerintah harus mengetahui secara tepat kendala-kendala yang menyebabkan rendahnya pemahaman dan informasi tentang *e-commerce* bagi UMKM. Lebih lanjut (Febriantoro, 2018) menjeaskan bagi pelaku/calon pelaku usaha UMKM diharapkan dapat mengetahui produk-produk apa saja yang paling diminati konsumen online sekaligus media yang

digunakan konsumen dalam melakukan pembelian secara online (potensi dan peluang). Faktor yang menghambat konsumen dalam melakukan pembelian secara *online* juga harus diketahui oleh pemerintah dan pelaku usaha supaya dapat dicari solusi serta strategi kreatif untuk mengatasinya.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang muncul seperti diatas menjadi tujuan permasalahan yang nantinya diangkat dalam penelitian ini, kemudian hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa penerapan inovasi kerjasama kolaboratif harus mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dan berguna berkesinambungan.

Penelitian ini mengambil studi kasus di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY dalam melakukan kolaborasi dengan JogjaKita dalam upaya mendukung keberlangsungan UMKM DIY untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Diharapkan kerjasama kolaboratif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY dengan JogjaKita sebagai pihak ekspedisi sejalan dengan langkah strategis yaitu untuk meningkatkan kualitas para pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki cakupan pada program kerjasama kolaboratif di Kota Yogyakarta yang berfokus pada pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Birokrasi terhadap implementasi *Collaborative Governance* dalam upaya peningkatan kualitas produk UMKM melalui program Si Bakul *Markethub* Gratis Ongkir yang mana telah diciptakan dengan tujuan mendorong pelaku UMKM untuk berpikiran terbuka, kreatif, dan inovatif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Seberapa besar pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Birokrasi terhadap implementasi *Collaborative Governance* dalam rangka memajukan UMKM DIY melalui program SiBakul *Markethub* Gratis Ongkir.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui presentase pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Birokrasi terhadap implementasi *Collaborative Governance* dalam rangka memajukan UMKM DIY melalui program SiBakul *Markethub* Gratis Ongkir.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Pemerintahan terutama dalam hal kolaborasi antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholders* dalam memajukan dan mengembangkan UMKM DIY melalui Program SiBakul *Markethub* Gratis Ongkir.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai kajian bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas fasilitas berbasis kemajuan teknologi terhadap Implementasi *Collaborative Governance* di Yogyakarta.

## 1.5 Kajian Pustaka (*Literature Review*)

Studi-studi terdahulu yang berkesinambungan dengan pengaruh sumberdaya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, dan birokrasi terhadap Implementasi *Collaborative Governance* di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. (Dyo, 2019) meneliti dengan metode kualitatif deskriptif tentang **Penerapan *Collaborative Governance* Pada Promosi Produk UMKM Tenun Balai Panjang di Kota Payakumbuh**. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas mengenai penerapan konsep *collaborative governance* pada promosi produk UMKM Tenun Balai Panjang masih ditemukan permasalahan terkait penerapan *collaborative governance* pada promosi produk UMKM Tenun Balai Panjang di Kota Payakumbuh. Untuk memperbaiki hal tersebut kemudian dibentuk suatu dokumen kesepakatan resmi untuk untuk menjelaskan kolaborasi yang dilakukan *multistakeholders* dalam mempromosikan produk UMKM Tenun Balai Panjang ini, sehingga akan menjelaskan batasan-batasan perilaku tentang apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, apa yang dikatakan melanggar dan apa yang dikatakan masih dalam ambang batas kewajaran, siapa pihak yang terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat.
2. (Ashari, E., n.d.) meneliti dengan metode kualitatif tentang **REFORMASI PENGELOLAAN SDM APARATUR, PRASYARAT TATA KELOLA BIROKRASI YANG BAIK**. Dari hasil penelitian disebutkan Faktor pendukung yang memerlukan strategi penguatan adalah pengembangan *Management Information System* Kepegawaian berbasis *Information Technology*, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengolahan data dalam rangka pengambilan keputusan. Disini sangat dituntut kompetensi

SDM Aparatur dalam hal penguasaan terhadap perkembangan teknologi dan pemahaman akan pelayanan prima yang seringkali menjadi tuntutan masyarakat di era modern saat ini.

3. (Destiana et al., 2020) meneliti dengan metode kualitatif deskriptif tentang **Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau**. Dari hasil penelitian, *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat terdiri dari Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Komunitas dan Media Massa. Dari sekian peran, peran policy creator belum optimal dibuktikan dengan belum diterbitkannya peraturan mengenai pariwisata halal di Kota Tanjungpinang. Peran koordinator juga belum optimal karena tidak adanya koordinasi seluruh *stakeholders*. Sedangkan berdasarkan aktivitasnya, hubungan *stakeholders* ditemukan dalam tiga jenis yaitu kerjasama, komunikasi dan koordinasi.
  
4. (Firman et al., 2017) meneliti dengan metode kualitatif tentang **Penerimaan dalam E-Government (Studi Fenomenologi pada Pengguna Layanan Terpadu Satu Pintu di BPTSP DKI Jakarta)**. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi *e-government* di Badan Pelayanan Terpadu satu Pintu, mencakup dua permasalahan. Pertama, permasalahan pada pengelola, dan yang kedua permasalahan pada penerimaan masyarakat. Permasalahan pada pengelolaan, yaitu masalah pada teknis atau dukungan pada sistem dan infrastruktur serta sumber daya manusia yaitu teknis. Permasalahan pada penerimaan masyarakat, merupakan dampak dari sistem yang diberlakukan dalam pelayanan. Sistem

dengan double mekanisme, membuat masyarakat merasa tidak efisien. Kedua permasalahan tersebut menjadi faktor utama dalam keberhasilan dan kegagalan diimplementasikannya *e-government* dalam pelayanan terpadu satu pintu.

5. (Wahyudiono, 2018) meneliti dengan metode kualitatif tentang **Manajemen UMKM: Orientasi Peran Stakeholder Dalam Membangun Daya Saing UMKM**. Hasil penelitian menyebutkan bahwa optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengelolaan sumber daya sektor UMKM sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor UMKM ini dimasa mendatang. *Stakeholder* dalam hal ini dapat mengambil peran melalui upaya kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi program pelatihan, pendampingan usaha, serta pemberdayaan di dalam upaya untuk membangun sinergi bersama dalam rangka mendorong penerapan manajemen dan pengelolaan UMKM yang lebih layak dan lebih baik.
  
6. (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020b) meneliti dengan metode kualitatif tentang **Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik**. Hasil penelitian mengungkapkan melalui kemitraan diharapkan akan menjadi evaluasi secara positif oleh warga, misalnya, mereka dianggap memiliki upaya serius untuk menjadi lebih efisien, responsif dan mampu memberikan layanan publik yang baik. Di sisi lain, motivasi utama bagi lembaga bisnis untuk melakukan kemitraan, secara umum, adalah untuk mengakses sumber daya pemerintah. Melalui kemitraan, maka dapat mengakses sumber daya yang tersedia di lembaga pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi sejumlah masalah publik yang sering terjadi.

7. (Sultan, 2022) meneliti dengan metode kualitatif tentang **Kolaborasi Stakeholders dalam Penyelenggaraan Corporate University pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan**. Hasil penelitian disebutkan penyelenggaraan CorpU dalam setiap *stakeholder* harus terlebih awal memiliki persepsi yang sama dan menciptakan ruang kolaborasi. Pegawai dalam mengaplikasikan pengetahuannya harus berdampak secara positif dalam bussiness performance dengan kata lain seberapa positifnya *Return on Training Investment (ROTI)*. Program ini dapat mentransfer pengetahuan dan pengalamannya kepada seluruh pegawai dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penerapan *Corporate University* dapat menentukan fungsi secara benar dan menjadi kebutuhan organisasi dalam mendukung capaian misi dan tujuan organisasi serta meminimalisir pembiayaan yang tidak relevan atas penerapan fungsi kebutuhan organisasi.
  
8. (Safitri, 2021) meneliti dengan metode kualitatif deskriptif tentang **Implementasi Program Uji Kompetensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri**. Hasil penelitian mengungkapkan adanya faktor pendukung implementasi program uji kompetensi TIK di SMA Negeri 1 Imogiri terdiri dari faktor internal yaitu fasilitas yang memadai serta dukungan penuh sekolah terhadap program. Sementara faktor eksternal yaitu adanya dana dari Pemerintah serta kerjasama sekolah dengan pihak luar. Faktor penghambat implementasi program uji kompetensi TIK di SMA Negeri 1 Imogiri terdiri dari faktor internal yaitu waktu pelatihan yang kurang. Sumber daya yang dimiliki SMA Negeri 1 Imogiri dalam melaksanakan program uji kompetensi TIK

meliputi sumber daya manusia, sumber pendanaan dan sumber daya fasilitas dalam melaksanakan program uji kompetensi TIK.

9. (Pada et al., 2021) meneliti dengan metode kualitatif tentang **STRATEGI BERTAHAN BISNIS DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DENGAN MEMANFAATKAN BISNIS DIGITAL (STUDI PADA UKM YANG TERDAFTAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TABALONG)**. Hasil penelitian mengungkapkan dalam upaya pengembangan UMKM digital, salah satu alternatif yang dilakukan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) adalah mengajak para inovator muda untuk mendukung program digitalisasi UMKM melalui program Pahlawan Digital UMKM. Program ini bertujuan agar selama masa pandemi Covid-19 ini, para pelaku UMKM tetap dapat bertahan dengan peningkatan penjualan dengan dukungan ekosistem digital. Kemenkop UKM memiliki strategi pengembangan digitalisasi UMKM dalam empat tahap, yaitu meningkatkan kualitas SDM, mengintervensi perbaikan proses bisnis, membantu perluasan akses pasar, dan memberdayakan pelaku UMKM.
  
10. (Faidati & Muthmainah, 2018) melakukan penelitian dengan metode kualitatif tentang ***Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri***. Hasil penelitian menunjukkan *Collaborative governance* dalam konteks ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah *stakeholder*. Namun dalam implementasinya masih ada tumpang tindih program serta kelompok sasaran. Hal ini salah satunya sebagai dampak dari ketiadaan data yang memadai baik yang dikelola oleh masing-masing *stakeholder* ataupun oleh pemerintah

sendiri. Sehingga ada komunitas UMKM yang memperoleh banyak program dan kegiatan dari *stakeholder* tertentu namun ada pula komunitas UMKM yang belum tersentuh perogram dan kegiatan terkait pemanfaatan teknologi.

11. (Mustafa, 2020) melakukan penelitian dengan metode kuantitatif tentang **Rancang Bangun Sistem Kolaborasi UKM Berdasarkan Manajemen Rantai Pasok untuk Peningkatan Daya Saing UMKM Kota Semarang**. Hasil penelitian menunjukkan model kolaborasi yang paling utama berdasarkan manajemen rantai pasok terletak pada potensi kolaborasi proses pemenuhan bahan baku masing-masing UMKM. Sistem kolaborasi UMKM dapat berjalan dengan baik namun untuk bisa lebih mempermudah penggunaan dan memberi manfaat maksimal perlu dikembangkan sistem berbasis aplikasi mobile. Fitur lain yang dibutuhkan dalam sistem kolaborasi adalah adanya layanan untuk berkomunikasi dengan pelaku UMKM lain didalam sistem sehingga dapat terdokumentasi dengan baik.
  
12. (M. Ichsana Nur, 2022) melakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif tentang **KOLABORASI GOVERNANSI DALAM PROGRAM UMKM JUARA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PELAKU USAHA JAWA BARAT**. Hasil penelitian menunjukkan program UMKM Juara belum secara komprehensif menerapkan kolaborasi governansi yang ideal untuk peningkatan kelas usaha di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari belum bersatunya seluruh prinsip- prinsip dan hubungan setiap *stakheloders* secara integratif, dan tidak meratanya pendistribusian kapabilitas yang ada sehingga dampak dari permasalahan tersebut menghambat pelaksanaan tindakan dalam kolaborasi

program tersebut. Oleh sebab itu perlu digunakan konsep/model perbaikan daripada tindakan yang dilakukan yakni diadakan suatu monitoring selama proses kolaborasi dalam Program UMKM Juara agar tindakan *stakeholders* dalam dinamika kolaborasi dapat terpantau dengan baik.

13. (Nirwana et al., 2017) melakukan penelitian dengan metode kualitatif tentang **Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang**. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam pembinaan Usaha Makro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Enrekang sebagai fasilitator, pendampingan, pendanaan, permodalan serta pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UMKM maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggap telah berlangsung dengan baik, namun tetap diakui bahwa ketiga hal tersebut masing-masing masih memerlukan perbaikan.
  
14. (Sailendra et al., 2021) melakukan penelitian dengan metode kualitatif tentang **Tatakelola Keuangan UMKM Berbasis ETAP dan Android Untuk Meningkatkan Efisiensi Kinerja Usaha pada Era Covid-19 Normal Baru**. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pengusaha UMKM belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan pembukuan sesuai standar akuntansi berbasis ETAP, untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja usaha mereka, terutama untuk tatakelola keuangan yang baik dan benar guna mengakses permodalan dari pihak ketiga. Semua pelaku usaha UMKM yang mengikuti pelatihan tatakelola keuangan berbasis SAK ETAP dan teknologi digital Android, menginginkan agar pelatihan sejenis dapat dilakukan pelatihan-pelatihan lanjutan

supaya mereka betul-betul dapat mengerti dan menguasai literasi akuntansi SAK ETAP dan teknologi tatakelola keuangan berbasis Android.

15. (Mirani & Aryansah, 2022) melakukan penelitian dengan metode kualitatif tentang **Efektifitas Program Palembang *Go-Digital* Bagi Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari program Palembang *Go-Digital* ini sendiri yaitu meningkatkan daya saing serta membantu mempromosikan produk maupun jasa yang diberikan oleh pelaku UMKM khususnya pada saat pandemi Covid-19 yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi usaha pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang. Beberapa faktor pendukung dalam menjalankan Program Palembang *Go-Digital* oleh para pelaku UMKM di Kota Palembang antara lain; pertama, pelaku UMKM sangat antusias dan memiliki harapan untuk dapat menerapkan pemasaran digital ini untuk menjual produknya. Terlebih lagi di masa pandemi yang membatasi interaksi sosial secara langsung, sehingga penjualan melalui kanal *digital* sangat dibutuhkan. Kedua, Pelaku UMKM sangat menerima dengan baik adanya program ini karena selain membantu mereka berjualan juga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas sehingga dapat membantu pendapatan mereka dalam penjualan secara *digital*. Ketiga, Pelaku UMKM dalam menjalankan program ini merasakan kemudahan seperti tidak perlu bertemu secara langsung walau dengan jarak yang jauh cukup dari *gadget* saja dan bisa langsung bertransaksi dengan waktu yang singkat di media sosial.

Namun demikian studi-studi dan penelitian terdahulu masih kurang memperhatikan faktor-faktor Sumber Daya Manusia sebagai pelaku, Teknologi

Informasi dan Komunikasi, dan Birokrasi dalam implementasi kerjasama kolaboratif. Penelitian berfokus pada pengaruh penyaluran pendanaan, pengelolaan anggaran dan pemasaran secara offline. Kemudian untuk sosialisasi tentang edukasi serta sosialisasi pemasaran produk secara online para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi sebagai faktor utama pengembangan ekspansi bisnis masih tergolong kurang. Berbagai permasalahan menjadi hal yang krusial untuk menjamin terciptanya implementasi kerjasama kolaboratif yang baik sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh (Dyo, 2019), (Ashari, E., n.d.), (Destiana et al., 2020), (Firman et al., 2017), (Wahyudiono, 2018), (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, 2020), (Sultan, 2022), (Safitri, 2021), (Pada et al., 2021), (Faidati & Muthmainah, 2018), (Mustafa, 2020), (M. Ichsana Nur, 2022), (Nirwana et al., 2017), (Sailendra et al., 2021), serta (Mirani & Aryansah, 2022). Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Birokrasi yang diduga mempengaruhi implementasi kerjasama kolaboratif di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada program SiBakul *Markethub* Gratis Ongkir tahun 2022.

## **1.6 Kerangka Teoritik (*Theoretical Framework*)**

### **1.6.1 Implementasi *Collaborative Governance***

Dewi, (2019) mendefinisikan kerangka *collaborative* dalam *governance* memberikan suatu pemaknaan yang lebih dari sekedar *governance*. *Collaborative governance* merupakan salah satu konsep dalam kebijakan publik yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Secara prinsip, *collaborative*

(kolaborasi) berbeda dengan *network* (jaringan) dan *partnership* (kemitraan). Ada nilai dasar tersendiri yang melekat padanya. Selanjutnya (Ali et al., 2018) menjelaskan kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Ini menyiratkan baik aktor maupun individu, kelompok atau organisasi bekerjasama dalam beberapa kegiatan. Menurut Intikaroh, (2018) *collaborative governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga-lembaga publik bersama aktor non negara dan pemangku kepentingan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik atau aset. Berdasarkan pengertian tersebut, menurut peneliti *collaborative governance* adalah suatu kegiatan yang mengikat antar pihak-pihak terkait. Pihak tersebut merupakan mitra dan partner kerja untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan guna menghasilkan barang dan pelayanan.

Definisi ini menyoroti bagaimana para pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda, kekuatan, dan kelemahan terlibat satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Bekerja secara kolektif bukan berarti tanpa adanya sebuah konflik. Konflik kemungkinan terjadi terutama ketika ada kebutuhan pembagian kewenangan sumber daya untuk penyediaan layanan sebagai bagian dari upaya implementasi. Meskipun demikian, komitmen untuk mencapai tujuan yang sama sangat penting untuk terlaksananya *collaborative governance*. Sehingga faktor kunci dalam pembentukan kolaborasi adalah ilmu pengetahuan, kepemimpinan dan pengalaman, selain itu faktor internal juga sangat menentukan seperti kepemimpinan politik dan dukungan keuangan. (Hudaya & Dewi, 2021). Selanjutnya (Retno Sunu

Astuti, Hardi Warsono, 2020b) dalam bukunya menjelaskan dalam bukunya faktor yang memberikan pengaruh terhadap kegiatan yang bersifat otonomi, saling kerjasama, serta kolaborasi. Faktor yang sangat memberikan pengaruh *collaborative* terdiri atas kemauan berkompromi, berkomunikasi, berkomitmen, saling mempercayai, transparansi, kemauan berbagi pengetahuan, dan kemauan bersama untuk mengambil sebuah resiko.

#### 1) Kesiediaan Berkompromi

Dua pihak atau lebih, di mana masing-masing menginginkan sesuatu yang berbeda, akan selalu menimbulkan konflik. Inti dari kolaborasi adalah manajemen konflik, yang berfokus pada menemukan kompromi yang akan membuat semua pihak merasa seolah-olah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan jika itu bukan apa yang mereka pikir mereka inginkan.

#### 2) Komunikasi

Kolaborasi yang efektif tidak dapat terjadi tanpa dukungan komunikasi yang baik, dan kolaborasi yang sukses lebih dari sekedar membagi tugas tetapi juga tentang menumbuhkan tekad untuk mencapai tujuan bersama.

#### 3) Komitmen

Dibutuhkan banyak komitmen untuk bisa berkolaborasi, tetapi apabila dilakukan dengan benar, kolaborasi dapat menghasilkan komitmen bersama. Artinya, keberhasilan suatu kolaborasi akan mengalami naik turun dengan tingkat komitmen yang dibawa oleh pemangku kepentingan yang terlibat.

#### 4) Saling Mempercayai

Kepercayaan harus jelas dalam kolaborasi yaitu bagaimana pekerjaan dilakukan, bagaimana kata-kata diucapkan, dan bagaimana hasil

diperhitungkan. Tanpa adanya kepercayaan, sebuah kolaborasi akan berantakan dan tidak dapat diperbaiki.

5) Transparansi

Transparansi memberikan dampak positif yaitu akan meningkatkan pertanggungjawaban para pemangku kepentingan sehingga kontrol terhadap para pemegang otoritas akan berjalan efektif.

6) Berbagi Pengetahuan

Berbagi pengetahuan dalam sebuah kolaborasi dapat membantu meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan. Kolaborasi akan mampu memberikan jawaban lebih cepat untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.

7) Kemauan Mengambil Resiko

Mengambil resiko merupakan sebuah tantangan dalam berkolaborasi. Diakrenakan dalam mengambil resiko saling berkaitan pada kreatifitas dan inovasi serta menjadi bagian terpenting dalam upaya mengubah sebuah ide menjadi kenyataan.

Selanjutnya dijelaskan juga ada kriteria yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan kegagalan berkolaborasi dalam implementasinya.

Beberapa faktor penghambat tersebut yaitu:

1. Faktor Budaya

Kolaborasi bisa saja mengalami kegagalan karena terdapat kecenderungan budaya ketergantungan pada sebuah prosedur serta tidak berani untuk mengambil terobosan & resiko. Ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil resiko merupakan salah satu hambatan terselenggaranya sebuah kolaborasi. Masih adanya dominasi dari pihak pemerintah dan tidak

menjalankan kesepakatan berdasarkan mentalitas kerjasama. Selain itu kolaborasi bisa saja mengalami kegagalan karena pemilihan anggota baru terpecah dengan menyediakan kepentingan kelompok yang pro pemerintah dan mengabaikan kelompok yang anti pemerintah.

## 2. Faktor Institusi

Kolaborasi dapat terjadi karena adanya kecenderungan institusi yang terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi terutama dari pemerintah cenderung menerapkan struktur hierarkis terhadap institusi-institusi lain yang ikut terlibat dalam kerjasama atau kolaborasi tersebut.

## 3. Faktor Politik

Kegagalan kerjasama dapat terjadi disebabkan oleh kurangnya inovasi dari pemimpin untuk menggapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kerjasama kemungkinan terhambat apabila para pemimpin dari kelompok-kelompok yang melakukan kerjasama tidak memiliki inovasi dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik satu sama lain. Selain itu, kerjasama bisa saja mengalami kegagalan karena terdapat perubahan keputusan bersama yang telah disetujui dari awal keputusan kerjasama dan adanya kepentingan baru yang berbeda diantara pemangku kepentingan terutama para pemimpin masing-masing kelompok.

### **1.6.2 Sumber Daya Manusia**

Menurut (Surajiyo, Nasruddin, 2020) mendefinisikan Sumber Daya Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Semua potensi yang dimiliki

oleh SDM tersebut sangat berpengaruh dalam upaya sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Di era sekarang dimana kemajuan teknologi, perkembangan informasi yang semakin pesat, apabila tanpa SDM maka akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Samsuni, (2017) mengungkapkan bahwa dalam mencapai tujuan, organisasi memerlukan berbagai sumber daya. Mulai dari sumber daya manusia, peralatan, mesin keuangan, dan sumber daya informasi. Setiap sumber daya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai suatu sistem, semua sumber daya tersebut akan berinteraksi dan saling bekerjasama sehingga tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Setiap organisasi baik organisasi perusahaan, sosial, pemerintahan mempunyai tujuan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan tertentu, dengan menggunakan sumber daya yang ada pada organisasi. SDM sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam berorganisasi memiliki peran yang penting dalam kesuksesan mencapai tujuan organisasi. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi bergantung kepada kemampuan SDM untuk melakukan tugas & fungsinya. Karena pada dasarnya SDM memiliki peranan aktif serta dominan dalam tiap aktifitas berorganisasi, dikarenakan SDM sebagai perencana, pelaku, sekaligus penentu terwujudnya tujuan sebuah organisasi.

### **1.6.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Menurut Setiawan, (2017) teknologi komunikasi merupakan penerapan prinsip-prinsip keilmuan komunikasi untuk memproduksi sebuah material bagi efektifitas dan efisiensi proses komunikasi. Sedangkan komunikasi dapat diartikan sebagai suatu sistem makro yang di dalamnya meliputi teknologi komunikasi, elektronik, dan teknologi informasi.

Selanjutnya menurut Liliweri, 2011:858 yang dikutip dalam (Setiawan, 2017) hubungan teknologi informasi dengan sebuah organisasi memiliki fungsi mengalihkan informasi untuk mencapai tujuan komunikasi. Teknologi Komunikasi dan Informasi harus dipahami sebagai istilah yang kompleks yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah manusia termasuk memecahkan sebuah informasi dalam komunikasi. Oleh karena itu, Teknologi Informasi dan Komunikasi digunakan untuk menggambarkan semua teknologi yang berkaitan dengan elektronik dibandingkan dengan yang berarti mekanis. Dari uraian diatas ditemukan perbedaan mendasar antara teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Teknologi komunikasi merupakan alat yang mampu menambah kemampuan individu berkomunikasi, sedangkan teknologi informasi adalah pengerjaan data oleh komputer dan telekomunikasi.

#### **1.6.4 Birokrasi**

Menurut (Sawir, 2020) dalam bukunya mendeskripsikan birokrasi sebagai orang-orang yang bekerja di balik meja tulis di kantor-kantor sebagai wujud dari aparat pemerintahan negara dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan melalui serangkaian tahapan atau biro yang masing-masing diberikan mandat atau dalam menentukan suatu kebijakan disesuaikan dengan kondisi dan situasi tentang kasus yang dihadapi. Suatu birokrasi merupakan jawaban yang rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh sebuah organisasi. Setiap pekerja atau pejabat dalam birokrasi merupakan pemicu dan penggerak dari sebuah mesin yang tidak mempunyai kepentingan pribadi.

Menurut (Dwiyanto, 2017) tujuan pembentukan birokrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pelayanan publik. Budaya birokrasi

telah membentuk sikap dan perilaku aparat serta mengajari mereka tentang cara berhubungan dan melayani warganya karena mereka dalam kesehariannya menjalankan prosedur dan peraturan, bertemu dan melayani warga, serta memahami kesenjangan yang terjadi antara peraturan dan prosedur yang ada dengan kebutuhan dan kondisi yang diperlukan agar birokrasi dapat menjalankan tugasnya melakukan pelayanan kepada warganya dengan baik.

Selanjutnya menurut (Yusriadi & Misnawati, 2017) birokrasi sendiri digambarkan sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Birokrasi merupakan instrumen dalam masyarakat yang kehadirannya diperlukan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis bahwa negara mempunyai misi untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut (Andriani & Setyowati, 2017) untuk dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan yang optimal, yaitu melalui peran budaya organisasi birokrasi sekaligus merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Salah satu unsur budaya organisasi birokrasi adalah berkembangnya inovasi dalam instansi pemerintah. Sebab inovasi merupakan hal sangat strategis yang memungkinkan birokrasi untuk berfungsi lebih dinamis, sehingga kinerja pelayanan publik dapat lebih baik.

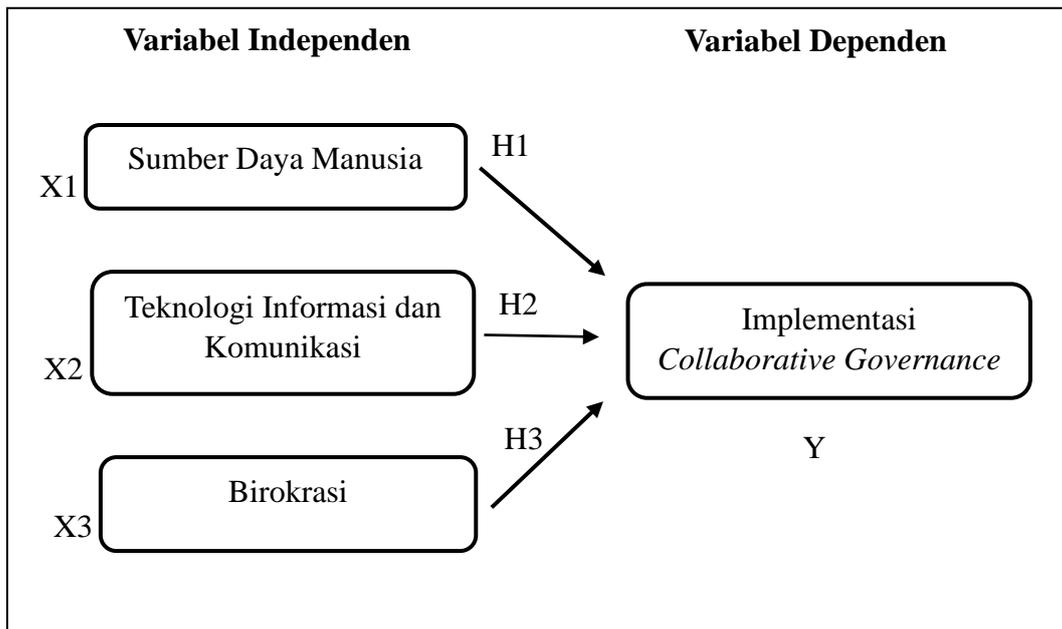
Budaya inovasi birokrasi membutuhkan inovator-inovator yang handal. Inovasi membutuhkan kreativitas, setiap aparat birokrasi tentunya selalu berpikir kreatif inovatif dan dapat menterjemahkan kedalam bentuk tindakan yang diinginkan dan bernilai jual tinggi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik. Berikut

beberapa poin penting dalam menggagas inovator (Mitchell Ditkoff) yang dikutip oleh (Andriani & Setyowati, 2017):

1. Senantiasa mengeksplorasi lingkungannya dan menginvestigasi kemungkinan-kemungkinan baru dan memiliki rasa kekaguman (*sense of awe*);
2. Tanggap terhadap kebutuhan dari dalam (*inner needs*) senantiasa secara proaktif memprakarsai proyek-proyek baru, menghargai setiap usaha;
3. Terbuka bagi setiap perubahan, mampu melakukan penyesuaian terhadap rencana-rencana bagi setiap perubahan, menyajikan berbagai solusi dan gagasan;
4. Menginkubasi setiap masalah dan tantangan, mencari dan merenungkan berbagai pertimbangan dalam mengambil keputusan serta mampu mengorganisasikannya.

Selanjutnya pada teori birokrasi modern menurut Weber yang dikutip dalam (Surur, 2019) menyatakan bahwa birokrasi rasional adalah birokrasi yang berdasar pada aturan-aturan formal, legalistik dan bukan didasarkan pada otoritas tradisional dan kharismatis. Konsekuensi dari konsep ini adalah pejabat bekerja bukan karena seorang pimpinan tetapi pada aturan- aturan main (hukum) yang ditetapkan. Hukumlah yang menjadi panutan pegawai, loyalitas pegawai hanya pada hukum bukan pada siapapun. Dengan begitu seorang pemimpin birokrasi akan memiliki otoritas hanya sesuai amanat hukum, dan ketaatan pegawai juga didasarkan pada hukum. Ketika pemimpin berganti, maka tidak ada masalah dalam birokrasi, karena prinsipnya siapapun tidak dipersoalkan karena ketaatan hanyalah pada hukum yang ditetapkan bukan hanya pada seorang pemimpin.

**Gambar 1.1 Kerangka Teoritik**



## 1.7 Hipotesa

- 1.7.1 Sumber Daya Manusia mempengaruhi Implementasi *Collaborative Governance* secara positif dan signifikan.
- 1.7.2 Teknologi Informasi dan Komunikasi mempengaruhi Implementasi *Collaborative Governance* secara positif dan signifikan.
- 1.7.3 Birokrasi mempengaruhi Implementasi *Collaborative Governance* secara positif dan signifikan.

## **1.8 Definisi Konsep dan Operasional**

### **1.8.1 Definisi Konsep**

#### **1.8.1.1 Implementasi *Collaborative Governance***

*Collaborative Governance* adalah suatu kegiatan yang mengikat antar pihak-pihak terkait. Pihak tersebut merupakan mitra dan partner kerja untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan guna menghasilkan barang dan pelayanan. Dalam *Collaborative Governance* para pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda, kekuatan, dan kelemahan terlibat satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap Implementasi Kerjasama Kolaboratif yaitu adanya kesediaan berkompromi, berkomunikasi, berkomitmen, saling mempercayai, transparansi, berbagi ilmu pengetahuan & kemauan bersama untuk mengambil sebuah resiko.

#### **1.8.1.2 Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, dan keterampilan. Sebuah organisasi memerlukan berbagai sumber daya salah satunya Sumber Daya Manusia yang nantinya saling berinteraksi dan saling bekerjasama sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Penentu berhasil atau tidak suatu organisasi tergantung pada kemampuan SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### **1.8.1.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebuah gambaran dari semua teknologi yang berkaitan dengan elektronik. Gambaran tersebut berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyebaran, dan penyajian sebuah informasi yang dikemas dalam sebuah teknologi dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam kehidupan manusia.

#### 1.8.1.4 Birokrasi

Birokrasi adalah suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir suatu pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi mempunyai prosedur atau aturan yang bersifat tetap, dan kewenangannya mengalir dari atas ke bawah.

#### 1.8.2 Definisi Operasional

**Tabel 1.1 Definisi Operasional**

Variabel	Indikator
Implementasi <i>Collaborative Governance</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Instansi pemerintah berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi ini</li><li>b) Organisasi non-pemerintah berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi ini</li><li>c) Organisasi non-pemerintah mempunyai andil besar dalam proses pembuatan keputusan dalam kolaborasi ini</li><li>d) Orientasi pemecahan masalah publik dalam kolaborasi ini</li><li>e) Teknologi informasi digunakan dalam kolaborasi ini</li></ul>
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Pelatihan kolaborasi dengan <i>stakeholders</i></li><li>b) Kemampuan melakukan interaksi dengan <i>stakeholders</i></li><li>c) Kemampuan menggunakan teknologi informasi</li></ul>
Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Kecanggihan <i>software</i></li><li>b) Keamanan data</li></ul>
Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Struktur birokrasi tidak lagi piramidal/elitis</li><li>b) Proses operasional fleksibel</li><li>c) Spesialisasi pekerjaan tidak lagi <i>ego sectoral</i> (tidak mementingkan instansinya sendiri)</li></ul>

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan tingkat pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, dan birokrasi terhadap implementasi *collaborative governance*, maka penelitian ini bertipe sebagai penelitian survey.

Menurut Danuri, (2019) penelitian survey merupakan penelitian yang sifatnya induktif atau berlandaskan pada sebuah teori. Metode penelitian survey menggunakan populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif disebut sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, obyektif, terukur rasional, dan sistematis.

Menurut (Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, 2020) tujuan penelitian kuantitatif dimulai dengan mengidentifikasi variabel-variabel utama dalam penelitian (bebas, interving, atau terikat) beserta model visualnya, lalu mencari dan menentukan bagaimana variabel-variabel itu akan diukur atau diamati. Selanjutnya tujuan penggunaan dari variabel-variabel secara kuantitatif adalah untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut, seperti yang biasa ditemukan dalam penelitian survei, atau untuk membandingkan sampel-sampel atau kelompok-kelompok tertentu dalam kaitannya dengan hasil penelitian seperti yang sering dijumpai dalam penelitian eksperimen.

### 1.9.2 Populasi (N) dan Sample (n)

Menurut Sugiyono (2017) dalam (Muhammad Darwin, et al. 2021) populasi adalah luas keseluruhan wilayah digeneralisasi terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas, kualitas serta karakteristik tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk menyusun interpretasi dan data penelitian yang berakhir dengan kegiatan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, populasi adalah *staff* atau pegawai Dinas Koperasi dan UKM DIY yang berjumlah 43 orang, jumlah pelaku UMKM yang terdaftar 344.051 orang, dan pegawai JogjaKita 25 orang.

Sugiyono (2010) menjelaskan sampel penelitian merupakan bagian yang memberikan gambaran secara umum dari populasi. Sampel penelitian mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan karakteristik populasi, sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili populasi yang diamati.

*Probability Sampling*. Menurut (Winarni, 2018) *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dimana didalamnya meliputi *simple random sampling*.

Selanjutnya menurut (Arieska & Herdiani, 2018) *simple random sampling* atau biasa disingkat *Random Sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Pemilihan responden didasarkan pada angka random dan diperoleh sejumlah responden yang terpilih sesuai dengan jumlah sampel yang didapatkan. Sehingga walaupun dilakukan pengambilan sampel secara acak, namun tetap memberikan hasil yang akurat dan memiliki tingkat presisi tinggi. Teknik ini digunakan karena sifat populasinya homogen yaitu khusus pada individu-individu yang terlibat dalam

kerjasama kolaboratif ini. Peneliti akan mengambil sampel 100 responden dari populasi yang berjumlah 344.119 orang yang terlibat dalam kerjasama kolaboratif SiBakul *Markethub* Gratis Ongkir. 43 pegawai Dinas Koperasi dan UKM, 344.051 pelaku UMKM, dan 25 pegawai JogjaKita dimasukkan ke dalam rumus Slovin karena jumlah populasi yang relatif besar, dengan batas toleransi kesalahan 10% yaitu:

Keterangan:

N : ukuran populasi

n : ukuran sample

e : presentase ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sample /  
batas toleransi kesalahan (10%)

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{344.119}{1+344.119(0,01)}$$

$$n = \frac{344.119}{3.442,19} = 100 \text{ orang}$$

Dari hasil perhitungan jumlah sample yang menggunakan rumus slovin peneliti mendapatkan total sampel sebanyak 100 orang, yang terbagi dalam 30 Pegawai/*Staff* Dinas Koperasi, 15 Pegawai/*Staff* JogjaKita, dan 55 pelaku UMKM. Peneliti mendapatkan jawaban dari masing-masing populasi yang akan diambil menggunakan teknik *random sampling*, sampel akan digunakan secara acak dari tiap populasi yang sudah dihitung.

### 1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rukajat, (2018) teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau pengadaan untuk keperluan penelitian dimana data yang sudah terkumpul adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisisioner (angket). Menurut Fausiah Nurlan, (2019) kuisisioner (angket) adalah pertanyaan tertulis yang sudah ditentukan oleh peneliti yang selanjutnya diberikan kepada responden yang sudah ditetapkan karakteristiknya. Penelitian ini menyebarkan kuisisioner berupa *google form* kepada 100 orang yang terlibat kerjasama kolaboratif dalam upaya memajukan UMKM DIY yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan teknik *mix method* dengan melengkapi data dengan wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan para pejabat dan *staff/pegawai* Dinas Koperasi dan UKM DIY serta *staff/pegawai* JogjaKita yang mengimplementasikan *collaborative government* yakni SiBakul *Markethub* Gratis Ongkir untuk mendapatkan data terkait implementasi *collaborative governance* dan data terkait kolaborasi yang dilakukan.

#### **1.9.4 Instrumen dan Pengukuran Data Penelitian**

Menurut (Dominikus Dolet Unaradjan, 2019) instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan sebuah data agar data yang diperoleh menjadi sistematis dan mudah untuk ditelaah. Selanjutnya instrumen yang diartikan sebagai alat bantu merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda contohnya angket (*questionnaire*), daftar cocok (*checklist*), skala (*scale*) dan sebagainya.

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah berupa kuisisioner tertutup. Menurut Sugiyono (2007:162) yang dikutip dalam (Rukajat, 2018) pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner adalah dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Untuk kuisioner tertutup jawaban untuk setiap butir pertanyaan/pernyataan telah disediakan.

Penelitian ini menggunakan Skala Likert dalam proses pengukuran datanya. (Pranatawijaya et al., 2019) menjelaskan bahwa Skala Likert adalah skala yang digunakan dalam mengukur persepsi, pendapat dan sikap seseorang/kelompok mengenai sebuah fenomena atau peristiwa sosial. Jawaban untuk setiap pertanyaan hanya terdapat satu jawaban yang dipilih responden dari lima alternatif jawaban yang sudah disediakan yaitu: **Sangat Setuju (SS)** dengan nilai 5, **Setuju (S)** dengan nilai 4, **Netral (N)** dengan nilai 3, **Tidak Setuju (TS)** dengan nilai 2, dan **Sangat Tidak Setuju (STS)** dengan nilai 1.

#### 1.9.5 Teknik Analisis Data

Dalam (Ernanda & Sugiyono, 2017) teknik analisis data dalam sebuah penelitian merupakan proses pencarian data, kemudian menyusun secara baik dan sistematis yang diperoleh dari data lapangan melalui kuisioner untuk nantinya digunakan sebagai landasan menjaab hipotesis yang telah dirumuskan dan selanjutnya di analisis dengan metode statistik.

Penelitian ini menggunakan SEM-PLS untuk menganalisis datanya. SEM PLS sendiri merupakan kepanjangan dari *Structure Equational Model-Partial Least Squares*. SEM-PLS adalah metode analisis data yang memanfaatkan teknologi yang di operasikan dengan menggunakan alat atau media computer. SEM dalam aplikasi untuk menghitung fenomena yang ada di lapangan serta dapat menguji hipotesis atau kebenaran yang sudah di perkirakan, sedangkan PLS pada aplikasi melihat varian yang mana dapat melakukan pengujian seperti halnya pengukuran sekaligus

pengujian model pada structural (Juliandi, 2018). SEM PLS ini dalam penelitian ini untuk menghitung *validitas* serta *reliabilitas* dan menguji regresi dan hipotesis.

Validitas adalah sebuah ketepatan yang dicermati dengan sebuah alat atau instrument dari penelitian untuk mengukur apa saja yang menjadi bahan penelitian dan yang dapat diukur dalam penelitian tersebut (Dyah Budiastuti, 2018).

Relibilitas adalah faktor atau alat ukur yang digunakan untuk menguji kekonsisten dari pernyataan atau jawaban dari responden dan sangat dipertimbangkan oleh peneliti dalam menganalisis, menyusun dan melaporkan hasil dari penelitian. (Janna & Herianto, 2021)

Uji Regresi merupakan satu dari berbagai metode yang digunakan untuk menentukan antar hubungan sebab dan akibat antara beberapa variabel dalam penelitian (Budi Darma, 2021). Sedangkan Uji Hipotesis merupakan prosedur pengujian yang bertujuan dalam memutuskan dengan mempertimbangkan kekuatan sample, memberikan landasan serta keputusan pada populasinya apakah nantinya pradugaan dapat diterima atau bahkan ditolak (Sunarsi, 2020).